

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Banyak cara yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat mulai dari perbaikan infrastruktur, memberikan fasilitas kesehatan yang berkualitas dan lain sebagainya. Hal ini tentunya membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Pajak adalah salah satu sumber pendapatan negara. Menurut Soemitro dalam Resmi (2006), pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang dapat digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Salah satu fungsi pajak yaitu fungsi *budgetair* (sumber keuangan negara), artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan.

Pemerintah berupaya memaksimalkan pemungutan pajak sebagai sumber keuangan negara. Hal tersebut ditempuh salah satunya dengan cara memperbaiki sistem pajak yang dimiliki contohnya dengan memberlakukan *self assessment system* yang merupakan sistem pemungutan pajak dengan memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar (Waluyo, 2012). Wajib pajak (WP) adalah subjek yang diwajibkan untuk membayar pajak, misalnya pajak atas kekayaan yang dimilikinya dan atas pendapatan atau laba yang diperolehnya (Ralona, 2006). *Self assessment system* di Indonesia diberlakukan sejak tahun 1968 yaitu sejak diundangkannya UU No.8 tahun 1967 tentang tata cara menghitung pajak sendiri. *Self assessment system* ini berlaku penuh (*full self assessment system*) sejak awal tahun 1984 khususnya terhadap pemungutan pajak penghasilan. Sistem ini diberlakukan dengan harapan Wajib Pajak memiliki kesadaran penuh dalam memenuhi kewajibannya.

Data Kementerian Keuangan (gambar 1.1) menunjukkan bahwa kenaikan penerimaan pajak meningkat tiap tahunnya namun nilai dari *tax ratio* (perbandingan antara jumlah penerimaan pajak dengan produk Domestik Bruto) masih kecil dan menunjukkan kenaikan yang lamban.



Gambar 1.1 Perkembangan Penerimaan Perpajakan, 2007-2012

Sumber: www.depkeu.go.id

Lambannya kenaikan *tax ratio* dikarenakan belum maksimalnya pengelolaan potensi pajak. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) orang yang aktif bekerja hingga 2011 mencapai sejumlah 110 juta orang sedangkan yang menyerahkan SPT hanya sekitar 7,7% atau 8,5 juta orang (Hartoyo, 2011).

Nota Keuangan dan RAPBN 2013 memperkirakan pendapatan negara dari PPh non Migas sejumlah 513,5 triliun rupiah di tahun 2013 meningkat sejumlah 68,8 triliun dari tahun 2012 dengan APBNP 445,7. Pencapaian angka tersebut tentunya membutuhkan jumlah wajib pajak yang besar dengan tingkat kepatuhan yang tinggi (depkeu 2012). Pemerintah dalam upaya memaksimalkan potensi pajak melaksanakan Sensus Pajak Nasional (SPN) yang nantinya diharapkan dapat memperluas basis pajak (Hartoyo, 2011).

Pajak penghasilan merupakan salah satu bentuk pajak langsung. Pajak langsung adalah pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain (Mardiasmo, 2003). Melihat hal tersebut Wajib Pajak dituntut mampu melaksanakan kepatuhannya dalam membayar pajak. Situs BeritaSatu.com mengungkapkan bahwa penerimaan pajak penghasilan (PPH) Orang Pribadi masih rendah. Rendahnya penerimaan tersebut dikarenakan Direktorat Jenderal Pajak belum memiliki data yang akurat terkait berapa jumlah tempat usaha/gerai *outlet* wajib pajak. Direktur P2 Humas DJP (Penyuluhan, pelayanan dan hubungan masyarakat Direktorat Jenderal Pajak) Kismantoro Petrus dalam situs tersebut mengatakan kendala di lapangan yang ditemui adalah kesulitan mengenai data jumlah *outlet* yang tersebar di Indonesia. Selain itu, lokasinya cenderung nomaden dan berubah-ubah.

Kepatuhan Wajib Pajak dipengaruhi baik faktor dari dalam diri Wajib pajak tersebut seperti motivasi dan pemahaman yang dimiliki Wajib pajak tentang perpajakan, serta faktor dari luar seperti manfaat yang dinikmati wajib pajak atas pajak tersebut serta bagaimana kualitas pelayanan fiskus yang mereka dapatkan. Faktor-faktor tersebut digunakan sebagai variabel bebas yang didasarkan pada penelitian sebelumnya. Motivasi diteliti oleh Sulistiyono (2012) dan Ghoni (2012) dimana Sulistiyono menemukan bahwa motivasi memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Lebih lanjut lagi Sulistiyono menjelaskan bahwa responden memiliki dorongan dalam dirinya karena memiliki motivasi dan kesadaran akan manfaat pajak yang dibayarkan. Hal ini sesuai dengan teori yang diutarakan Munadar (2008) bahwa motivasi merupakan suatu proses yang mendorong seseorang yang melakukan kegiatan untuk suatu tujuan dan harapan. Namun teori ini tidak mendukung penemuan Ghoni yang menemukan bahwa motivasi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengetahuan akan perpajakan diteliti oleh Handayani *et al.* (2011) dan menemukan bahwa seseorang yang memahami akan hak dan kewajibannya sebagai wajib pajak memiliki kepatuhan yang baik. Variabel Kualitas Pelayanan diteliti oleh Nugroho dan Sumadi (2004) dan menemukan adanya pengaruh terhadap kepatuhan

wajib pajak. Variabel terakhir yang digunakan yaitu Sensus Pajak Nasional (SPN) yang didasarkan dengan melihat langkah yang ditempuh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam rangka memperluas basis pajak (pajak.go.id). Berdasarkan hal tersebut peneliti ingin melihat apakah SPN yang dilaksanakan memberikan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal lain yang mempengaruhi rendahnya kesadaran wajib pajak yaitu adanya kesulitan dalam menghitung pajak yang harus dibayarkan serta stigma yang menggambarkan bahwa urusan pajak adalah urusan yang sangat kompleks.

Berdasarkan hal tersebut penulis ingin mengkaji faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak baik secara internal maupun secara eksternal. Adapun judul penelitian ini adalah **Pengaruh Motivasi, Pengetahuan Pajak, Kualitas Pelayanan dan Sensus Pajak Nasional (SPN) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi atas Pengenaan Pajak Penghasilan (PPh)** (Kajian empiris pada Wajib pajak Orang Pribadi KPP Wonocolo Surabaya).

1.2 Batasan Masalah

Penelitian ini hanya sebatas mengkaji pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi yang memiliki usaha sendiri di Surabaya. Selain itu faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang diteliti sebatas pada motivasi, pengetahuan pajak, kualitas pelayanan fiskus dan sensus pajak nasional.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, dirumuskan beberapa masalah:

1. Apakah motivasi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Surabaya?
2. Apakah pengetahuan tentang peraturan pajak dan persepsi atas perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang di Surabaya?
3. Apakah kualitas pelayanan dari petugas pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Surabaya?

4. Apakah sensus pajak nasional yang dilakukan oleh pemerintah berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Surabaya?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui dan menganalisis pengaruh motivasi terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Surabaya.
2. Mengetahui dan menganalisis pengaruh pengetahuan tentang pajak dan persepsi atas perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Surabaya.
3. Mengetahui dan menganalisis pengaruh kualitas pelayanan dari petugas pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Surabaya.
4. Mengetahui dan menganalisis pengaruh SPN yang dilakukan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Surabaya.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah manfaat teoritis dan empiris. Berikut adalah paparan manfaat dari penelitian ini:

1.5.1 Manfaat Teoritis

Adapun manfaat penelitian ini dibidang akademis yaitu:

1. Penelitian ini diharapkan memberikan bukti empiris terkait pengaruh motivasi membayar pajak, pemahaman tentang pajak, kualitas pelayanan petugas pajak dan SPN terhadap kepatuhan membayar pajak.
2. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi untuk pengembangan ilmu pengetahuan khususnya faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.
3. Penelitian ini juga diharapkan dapat menambah pengetahuan pembaca serta dapat dijadikan referensi penelitian yang berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

1.5.2 Manfaat Empiris

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran khususnya bagi KPP Wonocolo mengenai faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Surabaya sehingga KPP wonocolo dapat memperbaiki kelemahan-kelemahan dan mempertahankan kelebihan-kelebihan berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak.

1.6 Sistematika Penulisan

Penelitian ini terdiri dari lima bab:

BAB 1: PENDAHULUAN

Bab ini merupakan kerangka berpikir dimana dibahas mengenai latar belakang yang mendasari penelitian dilakukan. Bab ini juga membahas mengenai batasan masalah, rumusan masalah, batasan penelitian, tujuan penelitian manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

BAB 2: TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Dalam bab ini diuraikan teori-teori yang berkaitan dengan masalah yang dibahas, gambaran singkat mengenai penelitian terdahulu, variabel-variabel yang terlibat, pengembangan hipotesis, model penelitian dan bagan alur berpikir.

BAB 3: METODOLOGI PENELITIAN

Dalam bab ini menjelaskan tahapan penelitian yaitu jenis penelitian, populasi dan sampel, metode pengumpulan data, definisi operasional dan pengukuran variabel serta metode analisis data.

BAB IV : ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang gambaran umum responden analisis data penelitian, hasil pengujian hipotesis dan pembahasannya.

BAB V : KESIMPULAN

Bab ini berisi tentang kesimpulan penelitian dan implikasi yang mencakup implikasi secara teoritis maupun secara empiris, keterbatasan penelitian, dan saran-saran untuk penelitian selanjutnya yang membahas topik yang sama.